

**PEMENUHAN KEWAJIBAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP
TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DALAM KEGIATAN
OPERASIONAL LOGISTIK BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Oleh

I Kadek Anca Liana, NIM 2214101041

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan, spesifiknya sektor logistik yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja tinggi. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum memiliki kewajiban menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Namun, ketidakjelasan kriteria “potensi bahaya tinggi” menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan kewajiban dan pertanggungjawaban perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban hukum Perseroan Terbatas dalam penerapan SMK3 serta bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan kerja di sektor logistik. Penelitian hukum normatif dipilih sebagai metode penelitian dalam studi ini, dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan (1) bahwa kewajiban SMK3 bersifat mandatori dan melekat pada perusahaan sebagai pengendali tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab atas mitigasi risiko operasional. Frasa “potensi bahaya tinggi” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 merupakan norma kabur yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. (2) Pertanggungjawaban PT atas kecelakaan kerja mencakup pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban ganti rugi atas kelalaian (*liability*). Pertanggungjawaban perusahaan, kegagalan sistemik dalam penerapan SMK3 dikategorikan sebagai *corporate fault* yang berimplikasi langsung pada tanggung jawab direksi. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, Pertanggungjawaban diwujudkan melalui pemenuhan hak pekerja, termasuk pencegahan risiko, pelaporan kecelakaan dan jaminan sosial.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, SMK3, Kecelakaan Kerja, Logistik

***FULFILLMENT OF LIMITED LIABILITY COMPANIES' OBLIGATIONS
REGARDING WORKPLACE ACCIDENTS IN LOGISTICS OPERATIONS
BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 50 OF 2012 CON-
CERNING THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS***

By

I Kadek Anca Liana, NIM 2214101041

Legal Study Program

ABSTRACT

Occupational Safety and Health (OSH) is an important aspect of company operations, especially in the logistics sector, which has a high risk of workplace accidents. Limited liability companies as legal entities are required to implement an Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) based on Government Regulation No. 50 of 2012. However, the ambiguity of the criteria for “high hazard potential” creates legal uncertainty in determining the obligations and responsibilities of companies. This study aims to analyze the legal obligations of limited liability companies in implementing SMK3 and the forms of liability for work accidents in the logistics sector. The research method used was normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show (1) that SMK3 obligations are mandatory and inherent to companies as corporate governance controllers responsible for operational risk mitigation. The phrase “high potential danger” in Article 5 paragraph (2) letter b of Government Regulation Number 50 of 2012 is a vague norm that implies legal uncertainty. (2) PT's liability for work accidents includes civil liability in the form of liability for negligence. Corporate liability, systemic failure in the implementation of SMK3, is categorized as corporate fault, which has direct implications for the liability of the directors. From a labor law perspective, liability is manifested through the fulfillment of workers' rights, including risk prevention, accident reporting, and social security.

Keywords: Limited Liability Company, OHSMS, Workplace Accidents, Logistics